

ANALISIS EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI PERTANIAN PADA KECAMATAN JOGOROTO

Ira Nur Agustin¹, Zahrotul Ainiyah², Maya Anjelina Agustin³, Putri Dwi Agustina⁴, Cahya Awaliya Franciska⁵
Universitas PGRI Jombang^{1,2,3,4,5}

Email : iranuragustin60@gmail.com¹, zahrotulainiyah36@gmail.com²,
mayaanjelina1502@gmail.com³, putridwiagustina17@gmail.com⁴, cahyafranciska@gmail.com⁵

Abstract: This study aims to examine the effectiveness of institutional roles in the development of agricultural economy in Jogoroto District. Through field observations and interviews with various stakeholders, it was found that village institutions such as farmer groups, inter-village cooperation groups (KKAD), cooperatives, and agricultural extension centers play a significant role in improving farmers' productivity and welfare. Programs implemented, including agricultural infrastructure development, provision of production assistance, and technical training, have positively impacted the smooth production process and distribution of agricultural products. However, this study also identified several challenges, such as disparities in institutional capacity, limited human resources, and low digital literacy, which hinder optimal agricultural economic development. Therefore, strengthening institutional capacity and enhancing collaboration among stakeholders are recommended to support the sustainability of agricultural economic development in the region.

Keywords: Institutions, Agriculture, Village Government

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas kelembagaan dalam pengembangan ekonomi pertanian di Kecamatan Jogoroto. Melalui observasi lapangan dan wawancara dengan berbagai pihak terkait, ditemukan bahwa kelembagaan desa seperti kelompok tani, KKAD, koperasi, dan Balai Penyuluh Pertanian berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Program-program yang dijalankan, termasuk pembangunan infrastruktur pertanian, pemberian bantuan produksi, serta pelatihan teknis, memberikan dampak positif dalam memperlancar proses produksi dan distribusi hasil pertanian. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala seperti ketimpangan kapasitas kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya literasi digital yang menghambat pengembangan ekonomi pertanian secara optimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi rekomendasi utama untuk mendukung keberlanjutan pengembangan ekonomi pertanian di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Kelembagaan, Pertanian, Pemerintah Desa

Date of Submission : 14 Mei 2025	Date of Acceptance : 17 Mei 2025	Date of Publish : 30 Mei 2025
----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Pendahuluan

Pertanian merupakan sektor utama dalam struktur ekonomi pedesaan yang memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dinamika globalisasi, perubahan iklim, serta transformasi teknologi menuntut sektor pertanian untuk terus beradaptasi dan memperkuat fondasinya, tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga kelembagaan (Haryanto et al., 2022). Dalam konteks ini, kelembagaan memegang peran strategis sebagai penggerak

pembangunan pertanian yang inklusif dan berkelanjutan, karena mampu menjembatani kepentingan petani, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut (Nugraha et al., 2025), kelembagaan pertanian berfungsi sebagai instrumen koordinatif yang memperkuat tata kelola usaha tani melalui peran kelompok tani, koperasi, penyuluh pertanian, serta peran pemerintah desa. Kelembagaan yang efektif mampu memperluas akses petani terhadap modal, teknologi, informasi pasar, serta memperkuat posisi tawar petani dalam rantai nilai pertanian. Hal ini selaras dengan temuan (Ratna et al., 2023) yang menunjukkan bahwa keberadaan kelembagaan pertanian berperan dalam meningkatkan efisiensi usahatani dan memperkuat kemandirian petani, terutama di kawasan berbasis agribisnis.

Selain itu, (Rizky Fadillah, 2021) menegaskan bahwa kinerja kelembagaan kelompok tani berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan petani, khususnya dalam hal akses terhadap bantuan pertanian, pelatihan teknis, dan peningkatan kapasitas manajerial. Kelembagaan bukan hanya berfungsi sebagai wadah formal, melainkan juga sebagai sarana kolaborasi dan pertukaran informasi antar petani, sehingga menciptakan sistem pertanian yang lebih responsif dan mandiri.

Kecamatan Jogoroto di Kabupaten Jombang merupakan salah satu wilayah dengan potensi pertanian yang cukup signifikan. Berbagai desa di kecamatan ini telah mengembangkan program-program pemberdayaan pertanian melalui pendekatan kelembagaan, seperti pembangunan jalan usaha tani, irigasi, pemberian bantuan pupuk dan bibit gratis, pelatihan teknis, serta penguatan kelembagaan petani dan koperasi desa. Bahkan, sinergi antara kelembagaan desa, kelompok tani, penyuluh pertanian, dan instansi pemerintah telah menjadi fondasi utama dalam mendukung produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

Namun demikian, keberhasilan program-program tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan yang masih dihadapi, di antaranya adalah ketimpangan kapasitas kelembagaan antar desa, keterbatasan sumber daya manusia pengelola, serta belum optimalnya integrasi antara lembaga desa dengan jaringan agribisnis. Di samping itu, pola ketergantungan sebagian petani terhadap tengkulak serta keterbatasan literasi digital dalam pemanfaatan e-commerce menjadi kendala tersendiri dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan problematika efektivitas kelembagaan dalam pengembangan ekonomi pertanian di Kecamatan Jogoroto. Efektivitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini ditinjau berdasarkan tiga aspek, yaitu implementasi program kelembagaan, strategi yang dijalankan, dan ketercapaian dampaknya terhadap sektor pertanian. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada bagaimana efektivitas kelembagaan dalam pengembangan ekonomi pertanian ditinjau dari perspektif program, strategi, dan dampaknya di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis faktor kelembagaan dalam ekonomi pertanian dan upaya optimalisasi peran kelembagaan di Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Penelitian ini berfokus pada efektivitas program-program kelembagaan di beberapa desa tanpa menguji hipotesis secara statistik, melainkan mendeskripsikan secara mendalam peran kelembagaan dalam meningkatkan ekonomi pertanian. Lokasi penelitian meliputi Desa Alang-Alang Caruban, Desa Mayangan, Desa Jogoroto, dan Desa Sumbermulyo. Informan kunci dipilih melalui teknik purposive sampling, meliputi kepala desa, ketua KKAD, ketua Gapoktan, petani, petugas penyuluh pertanian, dan perwakilan instansi terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait program kelembagaan, peran dalam ekonomi pertanian, kendala, dan upaya optimalisasi. Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan pertanian dan interaksi antar aktor kelembagaan. Dokumentasi mengumpulkan data pendukung seperti laporan kegiatan kelompok tani dan data produksi pertanian. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif dan visual, serta penarikan kesimpulan yang diverifikasi melalui triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. Efektivitas Kelembagaan Perspektif Program Dalam Pertanian Desa

a. Desa Alang-alang Caruban

Dari hasil wawancara dengan Balai Desa Alang-Alang Caruban, program-program pertanian yang dijalankan desa sangat berfokus pada peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan kelompok tani. Salah satu program utama adalah pembangunan jalan rabat beton melalui program PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) yang menghubungkan Desa Alang-Alang Caruban dengan Desa Sawiji. Kepala Desa, Zuniati, menyampaikan bahwa pembangunan jalan ini sangat membantu memperlancar akses distribusi hasil pertanian sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat petani di kedua desa tersebut.

Selain infrastruktur, Desa Alang-Alang Caruban juga aktif mendorong pembentukan koperasi desa untuk mendukung kegiatan ekonomi petani. Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) baru-baru ini dilaksanakan untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih sebagai wadah pengelolaan hasil pertanian dan penyediaan sarana produksi. Program ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan ekonomi petani dengan memberikan akses yang lebih mudah terhadap modal dan pasar.

Ketua Kelompok Kerjasama Antar Desa (KKAD) Guyub Rukun, Imron, mengungkapkan bahwa program-program desa tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat, terutama para petani yang merasakan manfaat langsung dari perbaikan akses dan fasilitas. Selain itu, Balai Desa juga mengupayakan optimalisasi penggunaan air irigasi untuk pertanian melalui pembangunan jaringan irigasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi penggunaan air. Program ini mendukung produktivitas pertanian dengan memastikan ketersediaan air yang cukup bagi lahan sawah, sehingga hasil panen dapat lebih optimal. Kepala Desa menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui penguatan kelembagaan dan infrastruktur pertanian di Desa Alang-Alang Caruban.

Selain itu, Bapak Laden selaku ketua Gapoktan juga mengungkapkan bahwa:

“Salah satu program utama dalam bidang pertanian adalah pemberian bantuan pupuk dan bibit gratis kepada para petani dan bantuan alat pertanian seperti: Traktor, Kombi, Lotari, maupun bantuan pompa air dari bahan bakar listrik untuk pengairan sawah”.

Program ini bertujuan untuk meringankan beban biaya produksi yang selama ini menjadi kendala utama bagi petani, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga pupuk dan bibit di pasaran. Melalui program ini, petani diharapkan dapat

meningkatkan produktivitas lahan pertanian mereka secara signifikan. Selain itu, program bantuan pupuk dan bibit ini juga didukung dengan adanya sosialisasi terkait mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang dilaksanakan secara rutin di tingkat desa maupun kecamatan. Sosialisasi ini penting agar petani memahami tata cara pengajuan dan pendistribusian bantuan, sehingga proses penyaluran berjalan transparan dan tepat sasaran. Kegiatan seperti sosialisasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan penyaluran pupuk subsidi menjadi agenda rutin yang difasilitasi oleh kelembagaan desa bersama Balai Penyuluh Pertanian setempat.

Bapak Zainuri menambahkan bahwa keberadaan jalan rabat beton sangat membantu petani dalam menjual hasil panen, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani di desa.

Dari hasil wawancara juga terungkap bahwa program bantuan ini mendapat respons positif dari masyarakat tani. Mereka merasa sangat terbantu, terutama dalam mengurangi beban modal awal dan meningkatkan hasil panen. Namun, beberapa petani berharap agar ke depan jangkauan dan jumlah bantuan dapat ditingkatkan, serta ada pendampingan teknis lanjutan agar pemanfaatan pupuk dan bibit lebih optimal. Kelembagaan desa diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan kelompok tani dan instansi terkait untuk memastikan keberlanjutan serta efektivitas program-program pertanian di Desa Alang-Alang.



(Program PISEW desa alang-alang Caruban) (Program Irigasi desa alang-alang Caruban)

b. Desa Mayangan

Dari hasil wawancara dengan Balai Desa Mayangan, program-program pertanian yang dijalankan desa sangat berfokus pada peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan kelompok tani. Pak Zakaria menjelaskan bahwa program desa di Mayangan sangat mendukung petani melalui pemberian bantuan pupuk, bibit, dan fasilitas irigasi secara gratis. Menurut beliau, bantuan pupuk dan bibit ini sangat membantu para petani dalam mengurangi biaya produksi sekaligus meningkatkan hasil panen.

“Dengan adanya bantuan ini, para petani jadi lebih semangat mengelola lahan mereka karena modal awal bisa lebih ringan,” ujarnya.

Selain itu, sinergi antara Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) Desa Mayangan dan Polsek Jogoroto menghadirkan program ketahanan pangan berbasis pemanfaatan lahan tidur. Melalui konsep cooling system, lahan yang

sebelumnya tidak produktif kini diubah menjadi area tanam sayuran, pisang, dan tanaman pangan lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Kolaborasi ini menunjukkan peran kelembagaan sosial dan aparat keamanan dalam mendukung swasembada pangan dengan pendekatan partisipatif dan gotong royong, yang berdampak positif pada peningkatan kemandirian pangan desa.

Sementara, Pak Saifudin, sebagai ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Mayangan, menambahkan bahwa selain pupuk dan bibit, desa juga menyediakan pompa air diesel dan listrik untuk irigasi perpompaan. Pompa ini sangat penting terutama saat musim kemarau, karena dapat menjaga ketersediaan air untuk sawah.

Pak Saifudin mengatakan bahwa:

“Pompa air ini membuat irigasi jadi lebih lancar, sehingga tanaman tidak kekeringan dan hasil panen tetap stabil”.

Selain program pertanian, Desa Mayangan juga mengoptimalkan peran kelembagaan melalui pembangunan infrastruktur fisik desa seperti gedung Polindes dan perbaikan akses jalan menggunakan Dana Desa (DD). Pembangunan ini tidak hanya memperlancar distribusi hasil pertanian, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja sehingga memberi dampak ekonomi langsung. Keterlibatan aktif perangkat desa dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program ini menjadi kunci keberhasilan, sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa demi kemajuan ekonomi pertanian dan kesejahteraan warga.

Keduanya menegaskan bahwa program-program ini tidak hanya berupa bantuan fisik, tetapi juga disertai pendampingan teknis dari penyuluh pertanian dan koordinasi yang baik antara pemerintah desa, kelompok tani, dan dinas terkait.

Pak Zakaria menambahkan,

“Kami berharap program ini terus berlanjut dan diperkuat agar manfaatnya bisa dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh petani di Mayangan.”

Bapak Saifudin juga mengingatkan pentingnya perawatan dan pengelolaan bersama fasilitas irigasi agar tetap berfungsi optimal untuk mendukung ekonomi pertanian desa.

Menurut Bapak Heri, seorang petani sekaligus informan pendukung di Desa Mayangan, program bantuan pupuk, bibit, dan irigasi yang diberikan oleh pemerintah desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tani. Beliau menyampaikan bahwa dengan adanya bantuan pupuk dan bibit gratis, petani dapat mengurangi beban modal yang selama ini menjadi kendala utama dalam bercocok tanam.

“Sebelum ada bantuan ini, kami harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli pupuk dan bibit, sekarang jadi lebih ringan dan hasil panen pun meningkat,” ujarnya.

Selain itu, Bapak Heri juga menyoroti pentingnya keberadaan pompa air diesel dan listrik sebagai sarana irigasi yang sangat membantu terutama saat musim kemarau. Menurut beliau, pompa ini membuat air lebih mudah didistribusikan ke sawah sehingga tanaman tidak kekurangan air dan produktivitas tetap terjaga.

“Pompa air ini sangat membantu kami, apalagi saat musim kemarau panjang. Kalau tidak ada pompa, sawah bisa kering dan hasil panen menurun,” jelas Bapak Heri.

Beliau berharap program ini terus berlanjut dan mendapat perhatian serius agar petani di Mayangan bisa semakin sejahtera.



Sistem Irigasi Desa Mayangan



Program Pemberian Bibit Dan Penanaman Langsung Di Desa Mayangan

c. Desa Jogoroto

Program pertanian di Desa Jogoroto mendapat dukungan yang cukup signifikan dari berbagai pihak, terutama melalui bantuan pembangunan infrastruktur pertanian. Salah satu program utama yang berjalan adalah pembangunan saluran irigasi sepanjang 260 meter yang dikelola oleh Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Bangun Tirta dengan pendanaan dari program P3-TGAI Kementerian PUPR. Program ini bertujuan untuk memastikan pasokan air yang cukup bagi lahan pertanian di Dusun Jakung, sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi dan pendapatan petani setempat. Selain itu, terdapat pula pembangunan jalan usaha tani (JUT) yang memudahkan akses petani ke lahan mereka dan mempermudah distribusi hasil panen.

Selain pembangunan infrastruktur, Desa Jogoroto juga mendapatkan bantuan langsung berupa pupuk dan bibit gratis yang disalurkan melalui kelompok tani dan Gapoktan setempat. Bantuan ini sangat membantu petani dalam mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas tanaman. Gapoktan di desa ini juga aktif melakukan pembinaan dan penyuluhan pertanian, termasuk pelaksanaan dem pemupukan berimbang yang bertujuan meningkatkan kesuburan tanah dan mutu hasil pertanian. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan ini didukung oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Jogoroto yang berperan sebagai pusat pengembangan dan edukasi teknologi pertanian bagi petani lokal.

Program-program tersebut berjalan beriringan dengan upaya pemberdayaan petani melalui peningkatan kapasitas dan partisipasi aktif mereka dalam kelompok tani. Pemerintah desa bersama BPP dan HIPPA terus mendorong kolaborasi dan kemandirian petani dalam mengelola sumber daya pertanian, baik melalui pembangunan fisik maupun penyediaan sarana produksi. Dengan adanya dukungan infrastruktur irigasi, jalan usaha tani, serta bantuan pupuk dan bibit gratis, diharapkan produktivitas pertanian di Kecamatan Jogoroto dapat meningkat secara signifikan, sehingga kesejahteraan petani pun ikut terangkat.



Program Pemberian Bibit Dan Penanaman Langsung Di Desa Jogoroto

d. Desa Sumbermulyo

Dari hasil wawancara dengan Balai Desa Sumbermulyo, anggota Koramil Kecamatan Jogoroto memiliki peran aktif dalam mendukung program pertanian di wilayah tersebut. Salah satu program utama yang dibantu adalah pendampingan langsung kepada petani dalam kegiatan tanam jagung. Babinsa Koramil, seperti Serda Eko Santoso, turun ke sawah mulai dari pengolahan lahan hingga penanaman bibit jagung, memastikan proses berjalan lancar dan memberikan motivasi kepada petani agar lebih produktif dan mandiri.

Selain pendampingan tanam jagung, anggota Koramil juga terlibat dalam pengendalian hama, seperti pemberantasan tikus yang sering menjadi masalah utama bagi petani padi dan jagung di desa ini. Pendekatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengajak semua pihak terkait untuk bersinergi dalam mengoptimalkan ketahanan pangan di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan peran strategis Koramil dalam menjaga stabilitas produksi pertanian melalui pendekatan kelembagaan yang kuat.

Koramil juga berkontribusi dalam pembangunan sarana pertanian, seperti pembangunan irigasi perpompaan yang membantu meningkatkan ketersediaan air bagi lahan pertanian. Dengan adanya fasilitas irigasi ini, petani di Desa Sumbermulyo dapat mengelola air secara lebih efektif, sehingga produktivitas tanaman dapat meningkat dan risiko gagal panen akibat kekeringan dapat diminimalisir. Keterlibatan Babinsa dalam pembangunan dan pengawasan irigasi menunjukkan komitmen Koramil dalam mendukung infrastruktur pertanian yang berkelanjutan.

Optimalisasi peran kelembagaan Koramil dalam pertanian di Kecamatan Jogoroto juga diwujudkan melalui pembinaan dan pelatihan kepada petani, termasuk pengenalan teknologi pertanian modern dan praktik pertanian berkelanjutan. Pendampingan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas petani, tetapi juga memperkuat sinergi antara TNI dan masyarakat petani dalam mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Dengan demikian, Koramil menjadi mitra strategis dalam pengembangan ekonomi pertanian di Desa Sumbermulyo.

Dari keempat desa yang diamati, yaitu Desa Alang-Alang Caruban, Desa Mayangan, Desa Jogoroto, dan Desa Sumbermulyo, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kelembagaan dalam perspektif program pertanian desa menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani melalui pendekatan yang terintegrasi antara pembangunan infrastruktur, pemberdayaan kelompok tani, dan pemberian bantuan produksi. Program-program seperti pembangunan jalan usaha tani, saluran irigasi, serta distribusi

pupuk, bibit, dan alat pertanian secara gratis telah membantu menekan biaya produksi serta memperlancar akses petani ke lahan dan pasar.

Kelembagaan desa juga memperlihatkan peran penting dalam membina dan memperkuat kapasitas petani melalui pendampingan teknis, pelatihan, serta penyuluhan yang dilakukan oleh Balai Penyuluh Pertanian, organisasi kemasyarakatan seperti PRNU, hingga Koramil. Pembentukan koperasi desa, kelompok tani, dan Gapoktan menjadi wadah koordinasi yang mempererat hubungan antara petani dan pemangku kepentingan lainnya, serta mendorong terwujudnya ketahanan pangan berbasis masyarakat desa.

Dengan adanya sinergi yang baik antar lembaga, pemerintah desa, dan masyarakat tani, program-program kelembagaan yang dijalankan terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pertanian secara lebih mandiri dan berkelanjutan. Meskipun demikian, tantangan seperti peningkatan kapasitas SDM kelembagaan dan penguatan jaringan kemitraan agribisnis masih perlu menjadi perhatian agar efektivitas kelembagaan semakin optimal dan berdampak luas bagi masyarakat pertanian desa.



Sosialisasi Program Pertanian Desa sumbermulya

2. Efektivitas Kelembagaan Perspektif Implementasi dan Ketercapaian Dalam Pertanian Desa

a. Desa Alang-alang Caruban

Dari hasil wawancara dengan Kepala Balai Desa Alang-Alang Caruban, implementasi kelembagaan dalam ekonomi pertanian di desa ini berjalan cukup baik dengan dukungan berbagai program yang terintegrasi. Salah satu pencapaian utama adalah keberhasilan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan rabat beton melalui Program PISEW yang menghubungkan Desa Alang-Alang Caruban dengan Desa Sawiji. Infrastruktur ini sangat penting untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan akses petani ke pasar, sehingga mendukung peningkatan ekonomi lokal secara signifikan.

Kelembagaan pertanian di desa ini juga ditopang oleh keberadaan Kelompok Kerjasama Antar Desa (KKAD) Guyub Rukun yang berperan sebagai pelaksana swakelola pembangunan infrastruktur. Ketua KKAD Bapak Imron, menyatakan bahwa:

“partisipasi masyarakat dan tokoh lokal sangat tinggi dalam program ini, yang menunjukkan sinergi kelembagaan yang kuat antara pemerintah desa dan kelompok masyarakat”.

Hal ini menjadi indikator ketercapaian kelembagaan yang efektif dalam mendukung pertanian dan perekonomian desa. Selain itu, Balai Desa juga aktif dalam pembinaan dan pengelolaan kelompok tani melalui pertemuan rutin dan pelaporan penggunaan alat mesin pertanian (alsintan). Menurut petugas penyuluh

pertanian setempat, kegiatan ini membantu meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola usaha tani secara lebih profesional dan efisien. Kelembagaan penyuluhan ini menjadi ujung tombak dalam transfer teknologi dan pendampingan petani sehingga produktivitas pertanian terus meningkat.

Optimalisasi peran kelembagaan juga terlihat dari koordinasi yang dilakukan oleh Balai Desa dengan instansi terkait seperti BPP dan Dinas Pertanian Kecamatan Jogoroto. Kepala Balai Desa menegaskan bahwa:

“keterpaduan peran kelembagaan ini penting untuk memastikan program-program pertanian berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi petani”.

Dengan demikian, kelembagaan di Desa Alang-Alang Caruban telah menunjukkan ketercapaian yang baik dalam mendukung ekonomi pertanian melalui sinergi program, partisipasi masyarakat, dan koordinasi lintas sektor.

b. Desa Mayangan

Implementasi kelembagaan dalam ekonomi pertanian di Desa Mayangan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan petani seperti kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan). Kelembagaan ini berperan sebagai wadah koordinasi antara petani dengan pemerintah serta pelaku usaha agribisnis lainnya, sehingga memudahkan akses terhadap program pemerintah, penyuluhan, dan bantuan teknis. Namun, implementasi kelembagaan ini masih menghadapi tantangan dalam hal kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan organisasi yang profesional.

Ketercapaian kelembagaan di Desa Mayangan terlihat dari adanya peningkatan partisipasi petani dalam kegiatan kelembagaan dan usaha bersama, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. Kelembagaan ekonomi petani di sini mulai mengadopsi prinsip agribisnis dengan skala usaha yang lebih besar dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan usaha dari hulu hingga hilir. Meski demikian, masih diperlukan pendampingan intensif untuk memastikan kelembagaan ini dapat berfungsi secara optimal dan menguatkan posisi tawar petani di pasar.

Peran pemerintah dan lembaga terkait sangat penting dalam mendukung keberhasilan kelembagaan pertanian di Desa Mayangan. Pemerintah kecamatan dan dinas pertanian aktif memberikan fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan agar kelembagaan petani dapat berkembang sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dukungan ini juga mencakup penyediaan akses modal, informasi pasar, dan teknologi pertanian yang relevan agar petani mampu meningkatkan efisiensi usaha dan daya saing produk mereka.

Meski sudah ada kemajuan, optimalisasi peran kelembagaan dalam ekonomi pertanian di Desa Mayangan masih memerlukan beberapa upaya strategis. Di antaranya adalah peningkatan kapasitas SDM pengelola kelembagaan, penguatan jaringan kemitraan agribisnis, serta peningkatan transparansi dan tata kelola organisasi. Hal ini penting agar kelembagaan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi petani di wilayah tersebut.

c. Desa Jogoroto

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Balai Desa Jogoroto, implementasi kelembagaan dalam ekonomi pertanian di wilayah ini telah menunjukkan ketercapaian yang cukup signifikan. Pemerintah desa bersama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dan Provinsi telah memberikan berbagai bantuan yang mendukung pembangunan infrastruktur pertanian, seperti pembangunan irigasi saluran dan jalan usaha tani (JUT). Bantuan ini sangat membantu petani dalam mengoptimalkan pengelolaan lahan dan meningkatkan produktivitas pertanian di Kecamatan Jogoroto.

Selain itu, keberadaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan) di Jogoroto juga mendapat dukungan berupa bantuan pupuk dan bibit gratis yang disalurkan secara berkala. Bantuan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong petani untuk meningkatkan hasil panen dan mengurangi beban biaya produksi. Melalui kelembagaan ini, petani juga mendapatkan akses penyuluhan dan pelatihan teknologi pertanian terbaru yang difasilitasi oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Jogoroto, sehingga mereka dapat mengadopsi teknik pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Namun demikian, meskipun bantuan dan program kelembagaan telah berjalan, masih terdapat tantangan dalam hal partisipasi aktif petani dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, upaya optimalisasi peran kelembagaan terus dilakukan dengan memperkuat kapasitas kelompok tani, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa, BPP, dan petani, serta memperluas cakupan bantuan agar lebih merata dan tepat sasaran. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pertanian yang berkelanjutan di Kecamatan Jogoroto.

d. Desa Sumbermulyo

Pelaksanaan kelembagaan ekonomi pertanian di desa Sumbermulyo mengalami perkembangan yang cukup baik, terutama melalui pembentukan kelompok tani dan gapoktan sebagai wadah koordinasi petani. Menurut Kepala Desa Sumbermulyo, Bapak Fuad menyampaikan:

“Kelompok tani di desa kami berperan penting dalam menghubungkan petani dengan pemerintah dan pasar, sehingga memudahkan akses informasi dan bantuan teknis”.

Namun, beliau juga mengakui adanya kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mengelola kelembagaan secara profesional serta dana yang masih terbatas untuk pengembangan lebih lanjut.

Dari sisi implementasi, kelembagaan di Sumbermulyo telah melaksanakan berbagai program penyuluhan dan pemberdayaan petani yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Ibu Sri Wahyuni, seorang petani sekaligus anggota gapoktan, menyatakan,

“Kami merasa terbantu dengan adanya penyuluhan dan pelatihan yang diberikan, meskipun terkadang masih ada rasa kurang percaya karena pengalaman lama dengan tengkulak”.

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi petani cukup aktif, meski masih ada tantangan berupa persepsi negatif dan ketergantungan pada tengkulak yang harus diatasi.

Kendala utama dalam optimalisasi peran kelembagaan adalah komunikasi yang belum berjalan maksimal antara aparat desa, petani, dan pihak terkait, serta keterbatasan sumber daya finansial dan SDM. Menurut Bapak Maskur,

“Kami berharap ada peningkatan sinergi antara pemerintah desa, kelembagaan petani, dan sektor swasta agar usaha pertanian di desa ini bisa lebih maju dan petani lebih sejahtera”.

Dukungan dari pemerintah desa dan kecamatan sudah cukup terlihat, namun perlu adanya kerja sama yang lebih intensif untuk memperkuat kelembagaan dan memperluas akses pasar secara berkelanjutan.

Dari keempat desa yang diamati, yaitu Desa Alang-Alang Caruban, Desa Mayangan, Desa Jogoroto, dan Desa Sumbermulyo, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kelembagaan dari perspektif implementasi dan ketercapaian dalam pertanian desa menunjukkan hasil yang positif, meskipun dengan tantangan yang bervariasi di setiap desa.

Implementasi kelembagaan umumnya telah berjalan dengan baik melalui program-program strategis seperti pembangunan infrastruktur pertanian (jalan usaha tani dan irigasi), pemberdayaan kelompok tani dan Gapoktan, penyuluhan teknis, serta bantuan produksi (pupuk, bibit, dan alat pertanian). Keberhasilan ini ditopang oleh sinergi antara pemerintah desa, kelompok tani, penyuluh pertanian, dan instansi terkait.

Dari sisi ketercapaian, setiap desa menunjukkan capaian berbeda sesuai dengan potensi dan tantangan lokal. Desa Alang-Alang Caruban dan Desa Jogoroto menonjol dalam aspek koordinasi kelembagaan dan infrastruktur, Desa Mayangan kuat dalam kolaborasi kelembagaan sosial dan pemberdayaan lahan tidur, sedangkan Desa Sumbermulyo menekankan pendampingan dan penyuluhan meski masih terkendala SDM dan kepercayaan petani.

Secara umum, efektivitas kelembagaan terlihat dari meningkatnya partisipasi petani, produktivitas pertanian, serta akses terhadap bantuan dan pasar. Namun, optimalisasi peran kelembagaan masih memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan komunikasi lintas lembaga, dan perluasan jaringan kemitraan agribisnis agar manfaat kelembagaan dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan oleh seluruh petani desa.

3. Efektivitas Kelembagaan Perspektif Strategi dan Dampak Dalam Pertanian Desa

a. Desa Alang-alang Caruban

Strategi kelembagaan dalam ekonomi pertanian di desa Alang-alang Caruban ini menitikberatkan pada penguatan sinergi antara kelompok tani, pemerintah desa, dan instansi terkait seperti BPP dan Dinas Pertanian Kecamatan Jogoroto. Strategi ini diwujudkan melalui pembentukan dan penguatan Kelompok Kerjasama Antar Desa (KKAD) yang berperan sebagai pelaksana swakelola pembangunan infrastruktur pertanian, seperti jalan rabat beton dan irigasi. Pendekatan kolaboratif ini bertujuan meningkatkan akses pasar dan efisiensi produksi pertanian, sekaligus memperkuat peran kelembagaan lokal sebagai motor penggerak ekonomi desa.

Dampak dari strategi kelembagaan tersebut cukup signifikan. Kepala Balai Desa menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur yang didukung oleh KKAD telah memperlancar distribusi hasil pertanian dan menurunkan biaya

logistik bagi petani. Selain itu, keterlibatan aktif kelompok tani dalam perencanaan dan pelaksanaan program meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberhasilan program. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi petani dalam program-program desa dan peningkatan produktivitas pertanian yang berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga petani.

Selain itu, strategi kelembagaan juga mencakup peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan teknis yang dilakukan oleh penyuluh pertanian dan Balai Desa. Program pelatihan ini membantu petani mengadopsi teknologi pertanian modern dan praktik pertanian berkelanjutan, sehingga meningkatkan efisiensi dan hasil produksi. Kepala Balai Desa menegaskan bahwa pendekatan kelembagaan yang terintegrasi ini sangat penting untuk menjawab tantangan dalam ekonomi pertanian, khususnya dalam menghadapi dinamika pasar dan perubahan iklim.

Secara keseluruhan, dampak positif dari penguatan kelembagaan di Desa Alang-Alang Caruban terlihat dari meningkatnya kesejahteraan petani dan keberlanjutan usaha tani. Kepala Balai Desa menyatakan bahwa optimalisasi peran kelembagaan telah mendorong sinergi yang lebih baik antara pemerintah desa, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan, sehingga menciptakan ekosistem pertanian yang produktif dan berdaya saing di Kecamatan Jogoroto.

b. Desa Mayangan

Strategi kelembagaan di Desa Mayangan berfokus pada penguatan kelompok tani dan kelembagaan terkait melalui pendampingan teknis dan pengelolaan sumber daya secara kolektif. Pendekatan ini melibatkan peningkatan kapasitas petani dalam pengelolaan irigasi, pemanfaatan bantuan bibit dan pupuk, serta pengembangan usaha agribisnis berbasis kelembagaan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah desa, aparat keamanan, dan organisasi masyarakat seperti PRNU memperkuat peran kelembagaan dalam mendukung ketahanan pangan dan pemanfaatan lahan secara optimal. Strategi ini juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

Penguatan kelembagaan di Desa Mayangan telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap ekonomi pertanian. Dengan adanya kelembagaan yang kuat, petani dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengelolaan lahan serta akses terhadap input produksi yang lebih terjangkau. Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan petani dan ketahanan pangan lokal. Selain itu, kelembagaan yang solid mampu menjembatani komunikasi antara petani dan pemangku kepentingan lain, sehingga program-program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dampak sosialnya juga terlihat dari meningkatnya rasa kebersamaan dan gotong royong dalam mengelola sumber daya desa, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

c. Desa Jogoroto

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Balai Desa Jogoroto, strategi kelembagaan dalam mendukung ekonomi pertanian di wilayah tersebut sangat fokus pada pembangunan infrastruktur pertanian yang memadai. Bantuan pembangunan saluran irigasi dari pemerintah provinsi dan dukungan Gapoktan sangat berperan penting dalam memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian.

Infrastruktur irigasi yang baik ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dengan menyediakan pasokan air yang cukup dan merata, sehingga petani dapat mengelola usaha taninya secara optimal tanpa terganggu oleh kekurangan air.

Selain itu, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) juga menjadi bagian dari upaya kelembagaan untuk mempermudah akses petani ke lahan dan pasar. Dengan adanya JUT yang baik, distribusi hasil panen menjadi lebih lancar dan biaya logistik dapat ditekan, sehingga meningkatkan efisiensi dan keuntungan petani. Gapoktan dan kelompok tani di Jogoroto juga mendapatkan bantuan pupuk dan bibit secara gratis dari pemerintah, yang sangat membantu dalam menekan biaya produksi dan meningkatkan kualitas hasil pertanian. Bantuan ini menjadi stimulus penting agar petani dapat mengadopsi teknologi dan praktik pertanian yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dampak dari keberadaan kelembagaan yang aktif dan dukungan pemerintah tersebut terlihat dari meningkatnya kemandirian petani di Kecamatan Jogoroto. Petani semakin mampu mengelola sumber daya yang ada dengan lebih efisien dan produktif, serta memiliki akses yang lebih baik terhadap sarana produksi dan pasar. Selain itu, keterlibatan Gapoktan sebagai wadah koordinasi petani memperkuat solidaritas dan partisipasi petani dalam pembangunan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa peran kelembagaan sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pertanian yang berkelanjutan di Jogoroto.

d. Desa Sumbermulyo

Menurut Kepala Kelompok Tani Sumbermulyo, Bapak Maskur, strategi utama kelembagaan di desa ini adalah memperkuat peran kelompok tani sebagai wadah koordinasi petani. Beliau menjelaskan,

“Kami fokus membangun sinergi antara petani, pemerintah desa, dan dinas pertanian agar informasi dan teknologi pertanian bisa tersampaikan dengan baik. Dengan kelembagaan yang kuat, petani jadi lebih mudah mengakses bantuan dan pasar”.

Pendekatan ini juga melibatkan pembentukan gabungan kelompok tani yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas dan daya tawar petani. Dari sisi dampak, Ibu Sari, seorang petani sekaligus anggota kelompok tani, mengungkapkan,

“Sejak bergabung dalam kelembagaan ini, hasil panen kami meningkat dan kami bisa menjual produk langsung ke pembeli tanpa harus melalui tengkulak. Ini sangat membantu meningkatkan pendapatan keluarga”.

Kelembagaan ini memungkinkan petani mengelola usaha secara kolektif sehingga tercipta efisiensi dan skala ekonomi yang lebih baik. Selain itu, posisi tawar petani di pasar menjadi lebih kuat dan membuka peluang kemitraan dengan pelaku usaha lain.

Meski demikian masih ada tantangan dalam pengembangan kelembagaan ini, terutama terkait kapasitas sumber daya manusia dan dukungan regulasi. Menurut Bapak Maskur,

“Kami terus mendorong pelatihan manajemen kelembagaan dan memperkuat jaringan pasar agar kelembagaan bisa berjalan berkelanjutan.

Partisipasi aktif petani dalam pengambilan keputusan juga menjadi fokus kami,” jelasnya.

Upaya ini diharapkan mampu mengoptimalkan peran kelembagaan dalam mendorong ekonomi pertanian yang mandiri dan berdaya saing di desa Sumbermulyo.

Dari keempat desa yang diteliti Desa Alang-Alang Caruban, Mayangan, Jogoroto, dan Sumbermulyo dapat disimpulkan bahwa strategi kelembagaan dalam pertanian desa berperan sangat penting dalam memperkuat kemandirian, produktivitas, dan kesejahteraan petani. Setiap desa mengembangkan pendekatan strategis yang disesuaikan dengan potensi dan tantangan lokal, seperti pembangunan infrastruktur pertanian, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi lintas lembaga.

Kelembagaan lokal seperti kelompok tani, gapoktan, dan Kelompok Kerjasama Antar Desa (KKAD) terbukti efektif menjadi motor penggerak pembangunan pertanian melalui: Peningkatan akses pasar, Efisiensi produksi, Peningkatan kapasitas petani, dan Penguatan koordinasi antara petani, pemerintah desa, dan instansi terkait.

Dampaknya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi desa: distribusi hasil pertanian menjadi lebih lancar, biaya produksi dan logistik menurun, hasil panen meningkat, serta petani menjadi lebih mandiri dan berdaya saing. Selain itu, pendekatan partisipatif yang menekankan pada gotong royong dan keterlibatan masyarakat memperkuat solidaritas sosial dan keberlanjutan kelembagaan.

Namun demikian, beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, akses pasar yang belum merata, dan kebutuhan penguatan manajemen kelembagaan tetap menjadi perhatian. Oleh karena itu, optimalisasi peran kelembagaan perlu terus didorong melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan sinergi lintas sektor agar ekonomi pertanian desa semakin inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

B. PEMBAHASAN

Di Desa Alang-Alang Caruban, strategi kelembagaan difokuskan pada penguatan sinergi antara kelompok tani, pemerintah desa, dan instansi terkait seperti BPP dan Dinas Pertanian Kecamatan Jogoroto. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan Kelompok Kerjasama Antar Desa (KKAD) yang berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur pertanian seperti jalan rabat beton dan jaringan irigasi. Selain itu, desa juga mendorong pembentukan koperasi dan memberikan bantuan pupuk, bibit, serta alat pertanian secara gratis. Dampaknya, petani di desa ini merasakan peningkatan akses distribusi hasil panen, efisiensi produksi, dan pendapatan keluarga. Keterlibatan aktif kelompok tani dalam perencanaan dan pelaksanaan program juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberhasilan program desa.

Sementara di Desa Mayangan, kelembagaan desa bersama Gapoktan dan lembaga sosial seperti PRNU serta aparat keamanan berkolaborasi dalam program ketahanan pangan berbasis pemanfaatan lahan tidur. Bantuan pupuk, bibit, dan fasilitas irigasi gratis sangat membantu petani dalam menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil panen. Selain itu, adanya program irigasi perpompaan dengan pompa diesel dan listrik memperlancar pengairan sawah, sehingga produktivitas pertanian meningkat. Partisipasi masyarakat dan gotong royong dalam mengelola lahan tidur menjadi kekuatan utama dalam menciptakan kemandirian pangan dan memperkuat ketahanan ekonomi desa.

Di Desa Jogoroto dan Sumbermulyo, peran kelembagaan juga sangat terasa melalui optimalisasi bantuan pemerintah seperti pembangunan saluran irigasi, Jalan Usaha Tani (JUT), serta pemberian pupuk dan bibit gratis. Gapoktan dan kelompok tani menjadi wadah koordinasi dan distribusi bantuan, sekaligus pusat pelatihan dan pendampingan teknis bagi petani. Dampak positifnya, petani semakin mandiri dalam mengelola usaha tani, akses ke pasar lebih mudah, dan hasil panen meningkat. Sinergi antara kelembagaan desa, kelompok tani, dan instansi terkait menjadi kunci keberhasilan program pertanian di wilayah ini, sehingga tercipta ekosistem pertanian yang produktif, efisien, dan berkelanjutan di Kecamatan Jogoroto.

Jadi Kesimpulan Analisis Efektivitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Ekonomi Pertanian Pada Kecamatan Jogoroto adalah bahwa kelembagaan di Kecamatan Jogoroto, khususnya di empat desa yang diteliti (Alang-Alang Caruban, Mayangan, Jogoroto, dan Sumbermulyo), memainkan peran penting dalam meningkatkan ekonomi pertanian. Peran ini diwujudkan melalui berbagai program yang terintegrasi, meliputi peningkatan infrastruktur (jalan, irigasi), pemberdayaan kelompok tani, dan bantuan produksi (pupuk, bibit, alat pertanian). Koordinasi yang baik antara pemerintah desa, kelompok tani, dan instansi terkait memperkuat sinergi dan keberlanjutan program. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal peningkatan kapasitas SDM kelembagaan dan penguatan jaringan agribisnis.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelembagaan di Kecamatan Jogoroto telah berjalan secara efektif melalui program-program yang terencana, tersedianya sarana dan prasarana memadai, adanya peningkatan kapasitas anggota dan pengelola kelompok tani, serta terjalinnya koordinasi yang baik antar lembaga. Hal ini sejalan dengan pendapat (Sunarti, 2019) yang menyatakan bahwa pemberdayaan kelompok tani yang efektif ditandai oleh kemampuan organisasi dalam mencapai sasaran yang terarah melalui kebijakan yang terencana, ketersediaan sarana prasarana yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta terhindarnya ketegangan internal dalam pelaksanaan program. Temuan ini menguatkan bahwa prinsip-prinsip kelembagaan yang diterapkan di Kecamatan Jogoroto sudah selaras dengan teori efektivitas kelembagaan dalam pemberdayaan kelompok tani menurut penelitian sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi di beberapa desa di Kecamatan Jogoroto, dapat disimpulkan bahwa kelembagaan desa seperti kelompok tani, KKAD, koperasi, dan Balai Penyuluh Pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi pertanian. Program-program kelembagaan yang dijalankan, seperti pembangunan infrastruktur pertanian, pemberian bantuan pupuk dan bibit, serta pelatihan teknis, terbukti mampu meningkatkan produktivitas, memperlancar distribusi hasil panen, dan mendorong kesejahteraan petani. Kolaborasi antara pemerintah desa, kelompok tani, dan instansi terkait juga memperkuat efektivitas pelaksanaan program-program tersebut.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti ketimpangan kapasitas kelembagaan antar desa, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum optimalnya integrasi dengan jaringan agribisnis. Selain itu, ketergantungan petani terhadap tengkulak dan rendahnya literasi digital juga menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi pertanian secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, efektivitas kelembagaan dalam pengembangan ekonomi pertanian di Kecamatan Jogoroto sudah berjalan cukup baik. Namun, diperlukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan pendampingan teknis, serta perluasan jaringan kerjasama agar manfaat program dapat dirasakan lebih merata dan berkelanjutan oleh seluruh masyarakat tani.

References

- Haryanto, Y., Rusmono, M., Aminudin, A., Pury Purboingtyas, T., & Gunawan, G. (2022). Analisis Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani pada Komunitas Petani Padi di Lokasi Food Estate. *Jurnal Penyuluhan*, 18(02), 323–335.
<https://doi.org/10.25015/18202241400>
- Nugraha, A., Suryadi, E., Dwiratna, S., & Insani, F. R. (2025). Dinamika Usahatani Kentang: Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Petani Kentang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH*, 12(1), 593.
<https://doi.org/10.25157/jimag.v12i1.17606>
- Ratna, Fattah, Arifin, M., & Hasriani. (2023). Peran Kelembagaan Petani Dalam Pengembangan Usahatani Kentang Berbasis Agribisnis (Studi Kasus di Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng). *Jurnal Ilmiah Agribisnis, Volume 6*(E-ISSN 2614-5928), 1–10.
- Rizky Fadillah, M. (2021). (*CAPSICUM ANNUM L*) (Studi Kasus : Kelompok Tani Juli Tani Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang) SKRIPSI OLEH : MUHAMMAD RIZKY FADILLAH (*CAPSICUM ANNUM L*) (Studi Kasus : Kelompok Tani Juli Tani Desa Sidodadi Ramunia Kecama.
- Sunarti, N. (2019). 2401-8149-1-Pb. *Moderat*, 5 No. 2(EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN DALAM PENGEMBANGAN KELOMPOK TANI DI PEDESAAN), 80–100.